

**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
DAERAH PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN MAJENE**

SKRIPSI

Oleh
NUTVI AHYUNIN
105730540815



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
DAERAH PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN MAJENE**

SKRIPSI

Oleh
NUTVI AHYUNIN
105730540815

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

“Tidak ada yang tidak dapat kita capai apabila kita berusaha. maka ingatlah kepadaKu, aku akan selalu ingat kepadamu, Bersyukurlah atas kenikmatanKu kepadamu dan janganlah mengingkariKu”.
(Al-baqarah:152)

Kupersembahkan karya ini kepada Almarhum Ayahanda Surachman dan Almarhuma Ibunda tercinta Hasmiati yang telah memberikan semangat serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan putrinya.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene".

Nama Mahasiswa : Nutvi Ahyunin
No. Stambuk/NIM : 105730540815
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia Penguji Skripsi Starata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di Ruang IQ. 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM
NIDN : 09250866302

Mira, SE., M.AK.Ak
NIDN : 0903038803

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

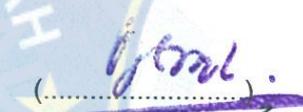
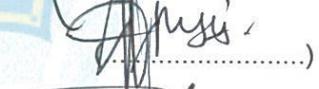
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **NUTVI AHYUNIN, NIM 105730540815**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 145/ Tahun 1440 H/ 2019 M, Tanggal 30 Dzulhijjah 1440 H/ 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Muharram 1440 H
14 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E.,MM (.....) 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,MM (.....) 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E.,MM (.....) 
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.,Ak.CA.CSP (.....) 
2. Saida Said, S.E.,M.Ak.Ak (.....) 
3. Wa Ode Rayyani, S.E.,M.Si.,Ak.CA (.....) 
4. Asriati, S.E.,M.Si (.....) 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nutvi Ahyunin
Stambuk : 105730540815
Program studi : Akuntansi
Dengan Judul : " Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 September 2019

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

13BB7ADF094492676

6000
ENAM RIBU RUPIAH


Nutvi Ahyunin

Diketahui oleh:



Ketua Program Studi,


Dr. Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak., CA.CSP

NBM. 107 3428

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene ”.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM, Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mira, SE., M.Ak.Ak, Selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.

6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 terkhusus kelas Akuntansi 7.15 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene yang telah memberikan izin meneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
10. Teristimewa kepada yang tercinta kedua orang tuaku yang telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis, dan telah melahirkan memelihara dan mendidik serta senantiasa mendoakan, sehingga penulis dapat melewati semua hambatan. Serta saudara-saudaraku Siska Surachman, S.Pd, Adrian Surachman, S.Pd, dan Rifaldy Surachman, SE, semoga Allah SWT memberiksn kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita.
11. Yang paling spesial Muhammad Supriyadi, dan sahabatku Reni Artha Pratiwi, Nurunniswah, Ira Nurandina, Hutami Nurul Adinda, Satrianti, Nuraisyah Syadia, Adelia Dwi Lestari, Alfatiha Purnamasari, Nara Misran, terimakasih atas bantuan, kebersamaan, dan dukungannya, semoga persahabatan kita awet selamanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini bernilai ibadah di sisi-Nya serta bermamfaat bagi yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Akhirnya, semoga aktivitas yang telah kita lakukan mendapat bimbingan, bernilai ibadah dan Ridho dari-Nya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Makassar, 14 September 2019

Nutvi Ahyunin

ABSTRAK

NUTVI AHYUNIN, Tahun 2019 Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene, Skripsi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Abd Rahman Rahim dan Pembimbing II Mira.

Penelitian ini berjudul Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kab. Majene tahun 2016-2017 dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi dan dokumentasi Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui field research dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tergolong sangat rendah dan pola hubungannya instruktif, rata-rata tingkat efektifitas keuangan daerah kab. Majene pada tahun 2016 tidak efektif karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu 90% untuk tahun 2017 dapat dikatakan berimbang karena nilai yang diperoleh yaitu 100%, rata-rata tingkat rasio efisiensi tergolong efisien, rasio keserasian menjelaskan bahwa hasil belanja operasi lebih di prioritaskan dibandingkan belanja modal, rasio pertumbuhan ekonomi periode 2016-2017 mengalami pertumbuhan yang positif karena pendapatan pada tahun 2016 2% dan meningkat sangat pesat di tahun 2017 yaitu sebesar 15%.

Kata Kunci : Analisis Rasio, Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

NUTVI AHYUNIN, 2019 Ratio Analysis to Assess the Regional Financial Performance at the Regional Office of Finance and Assets (BKAD) Majene Regency, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Supervised by Supervisor I H. Abd Rahman Rahim and Supervisor II Mira.

This study is entitled Ratio Analysis to Assess the Regional Financial Performance at the Regional Office of Financial Assets and Assets (BKAD) of Majene Regency. This study aims to determine the financial performance of the district. Majene in 2016-2017 seen from the Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Harmony Ratio, and Regional Financial Growth Ratio. This research is a quantitative descriptive study, the source of the data used is the primary source, namely information sourced from direct observation to the research location by observation and documentation, while secondary sources are data obtained from library studies to supplement primary data. Data collection is done through field research by observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the level of regional independence is classified as very low and the pattern of instructive relations, the average level of financial effectiveness of the district. Majene in 2016 was ineffective because the value obtained was still below 100% ie 90% for 2017 it could be said to be balanced because the value obtained was 100%, the average efficiency ratio was classified as efficient, the harmony ratio explained that the results of operating expenditure were prioritized Compared to capital expenditure, the ratio of economic growth in the 2016-2017 period experienced a positive growth because revenues in 2016 were 2% and increased very rapidly in 2017 which was 15%.

Keywords: Ratio Analysis, Regional Financial Performance

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teoritis	5
1. Kinerja Keuangan	5
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	7
a. Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Negara	7

b.	Proses Penyusunan APBD	8
c.	Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	9
d.	Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	18
e.	Manfaat Pengukuran Kinerja.....	18
B.	Tinjauan Empiris.....	19
C.	Kerangka Pikir	24
D.	Hipotesis.....	25
BAB III	METODE PENELITIAN.....	27
A.	Jenis Penelitian	27
B.	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
C.	Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya	28
D.	Populasi Dan Sampel	31
E.	Metode Pengumpulan Data.....	32
F.	Metode Analisis Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A.	Gambaran Umum Perusahaan	37
B.	Analisis Data.....	48
C.	Pembahasan	56
BAB V	PENUTUP	60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1	Pola Hubungan Dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	11
2.2	Kriteria Pengukuran Efisien.....	14
2.3	Penelitian Terdahulu	19
3.1	Jadwal Penelitian	28
3.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	34
3.3	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	36
4.1	Daftar Nama-nama Pegawai/Staf BKAD Kabupaten Majene	39
4.2	Rasio Kemandirian BKAD Kabupaten Majene	49
4.3	Rasio Efektivita BKAD Kabupaten Majene.....	51
4.4	Rasio Efisiensi BKAD Kabupaten Majene	52
4.5	Rasio Keserasian BKAD Kabupaten Majene (Belanja Modal).....	54
4.6	Rasio Pertumbuhan Bkad Kabupaten Majene.....	55

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir	25
4.1 Struktur Organisasi	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas tadi berangsur-angsur mulai teratasi.

Menurut Kasman Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada tahun 2017 Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Majene antara lain: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kekurangan sehingga di kabupaten Majene mengalami Defisit (2) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (3) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PDA) yang relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer, (4) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali

sumber-sumber pendapatan yang ada, (5) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Sehubungan dengan adanya reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang yang sangat penting artinya dalam sistem pemerintahan pusat, daerah, dan dalam sistem hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kedua undang-undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah, telah diubah menjadi UU No. 32 dan 33 tahun 2004. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dalam usaha pembangunan perlu dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga pemberian otonomi dan desentralisasi di bidang keuangan perlu ditempuh agar usaha pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Karena kabupaten Majene merupakan kabupaten yang masih sangat berkembang dan merupakan kabupaten yang dibentuk setelah terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, dengan hal ini dapat diketahui bahwa kabupaten Majene merupakan kabupaten yang masih baru dengan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga hal ini menjadi alasan kenapa dilakukannya penelitian di kantor BKAD Kabupaten Majene.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan dan kemandirian daerah Kabupaten Majene adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Majene dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil

judul “*Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Secara operasional tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai wujud aplikasi teori, menambah wawasan keilmuan atas penerapan teori yang dimiliki terhadap aplikasinya di lapangan dan apresiasi minat pada pokok kajian Akuntansi dengan mengadakan penelitian tentang penerapan rasio Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memfokuskan kepada kantor BKAD Kabupaten Majene sebagai objek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan rasio kinerja keuangan. Dan bisa juga menjadi masukan yang bermanfaat serta memunculkan ide dan konsep baru dalam penelitian selanjutnya sehingga penelitian nanti akan jauh lebih baik lagi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Kinerja Keuangan

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang *strategic planning* suatu organisasi.

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oasi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk Kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi

pemerintah daerah. Menurut Mohamad Mahsun (2012:196) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (Inputs), misalnya :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c. Jumlah infra struktur yang ada
 - d. Jumlah waktu yang digunakan
2. Indikator Proses (Proses), misalnya :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator Keluaran (Output), misalnya :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
4. Indikator Hasil (Outcome), misalnya :
 - a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat
5. Indikator Manfaat (Benefit), misalnya :
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Tingkat pasrtisipasi masyarakat
6. Indikator Impact, misalnya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

b. Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- 2) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

- 4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
- 5) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

c. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis merupakan penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi, sedangkan rasio adalah alat ukur perbandingan antara dua atau lebih aspek yang dinyatakan dalam angka. Jadi analisis rasio yaitu suatu penyelidikan atau penelitian terhadap suatu peristiwa atau kegiatan dengan melakukan perbandingan antara satu dengan yang lainnya yang dinyatakan dalam bentuk angka.

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mohamad Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan

akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4).

Analisis rasio APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Abdul Halim (2012:4) adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu : pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah :

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan

daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

- a) Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah, (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b) Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c) Pola Hubungan Partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d) Pola Hubungan Dekegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2) Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus Rasio Efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2012:187), adalah :

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif.

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2013:112) yang menyatakan

bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Pengukuran Efisien

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

4) Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 hal.236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

a) Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Rotal Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 hal.164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio Belanja Operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b) Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif,

maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008 hal. 241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

d) Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2012:121) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

e) Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- 2) Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- 4) Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- 5) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

- 6) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian mengenai analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan daerah tidak hanya dilakukan sekali ini saja. Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai penerapan penggunaan rasio keuangan terhadap kinerja keuangan di kantor daerah, berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Jurnal	Metode Penelitian	Motivasi Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Hendry Andres Maith (2013)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	Metode Analisis Deskriptif	Untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk ditinjau dari analisis laporan keuangan.	Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga keadaan perusahaan dikategorikan dalam keadaan baik (<i>Liquid</i>). Dari Rasio Solvabilitas menunjukkan bahwa modal perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor sehingga keadaan perusahaan dikatakan dalam

					keadaan tidak baik (<i>Insolvable</i>).
2.	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta	Metode Kuantitatif	Untuk mengetahui kinerja keuangan PemKot Surakarta tahun 2010-2011 serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola sumber dayanya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83% (2010) dan 24,44% (2011)
3.	Dedi Suhendro (2018)	Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Menggunakan Rasio Keuangan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini menggunakan data yang bersifat Kualitatif dan data Kuantitatif.	Untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada PT. Unilever Indonesia Tbk periode 2010-2015.	Hasil Penelitian ini adalah rasio likuiditas, current rasio dan quick rasio menurun yang menandakan likuiditas perusahaan kurang baik dan dalam memenuhi kewajiban lancarnya belum dikatakan baik. Rasio manajemen aset meningkat secara keseluruhan, disebabkan

					<p>perusahaan sudah efisien dalam penggunaan asetnya untuk menciptakan penjualan yang akan meningkatkan laba perusahaan. Rasio manajemen utang, total utang terhadap total aktiva sudah cukup baik karena perusahaan mampu menutupi beban bunga dengan dana yang dimiliki. Rasio profitabilitas menunjukkan kinerja kurang baik karena laba bersih setiap penjualan yang diperoleh semakin menurun. Kurang efisiennya kinerja dalam mengoptimalkan modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih tetapi menggunakan aktivitya secara produktif semakin meningkat, dengan demikian keuntungan yang diperoleh perusahaan berdasarkan investasi yang ditanamkan pada perusahaan cukup baik.</p>
4.	Lambok DR Tampubolon (2015)	Analisis Pengaruh Rasio Keuangan :	Metode yang digunakan adalah	Agar masyarakat luar dapat mengakses	Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel independen

		Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage Terhadap Penilaian Kinerja Keuangan Studi Empiris: Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012	teknik regresi berganda	ukuran laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat ukur, yaitu rasio keuangan yang diharapkan untuk masyarakat luar tidak hanya mengakses kinerja dengan melihat langsung seberapa tinggi hasil keuntungan, tetapi menilai kinerja dengan mengukur kemampuan perusahaan.	signifikan dan berpengaruh terhadap variabel dependen.
5.	Cherrya Dhia Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan	Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi berganda.	Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Utara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yangng dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan

					mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.
6.	Dedi Suhendro (2017)	Analisis Profitabilitas dan Likuiditas Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Siantar Top Tbk.	Metode yang digunakan adalah deskriptif	Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan Pt. Siantar Top Tbk dengan menggunakan rasio keuangan.	Rasio keuangan yang digunakan yaitu profitabilitas dan likuiditas. Rasio profitabilitas pada PT. Siantar Top Tbk menunjukkan Kinerja perusahaan yang efisien ditinjau nilai rata-rata rasio <i>Net Profit Margin</i> Karena berada diatas rata-rata Industri (<i>time series</i>). Rasio <i>Return On Asset</i> (ROA) juga efisien disebabkan karena nilai laba bersih perusahaan cenderung mengalami peningkatan dan berada diatas rata-rata industri. Nilai rata-rata REO dibawah rata-rata industri untuk kinerja keuangan dikatakan tidak efisien.
7.	Masita Mahmud, George Kawung, dan Wensy Rompas (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Profinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Metode yang digunakan adalah deskriptif	Untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2007-2012	Berdasarkan hasil penelitian digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja

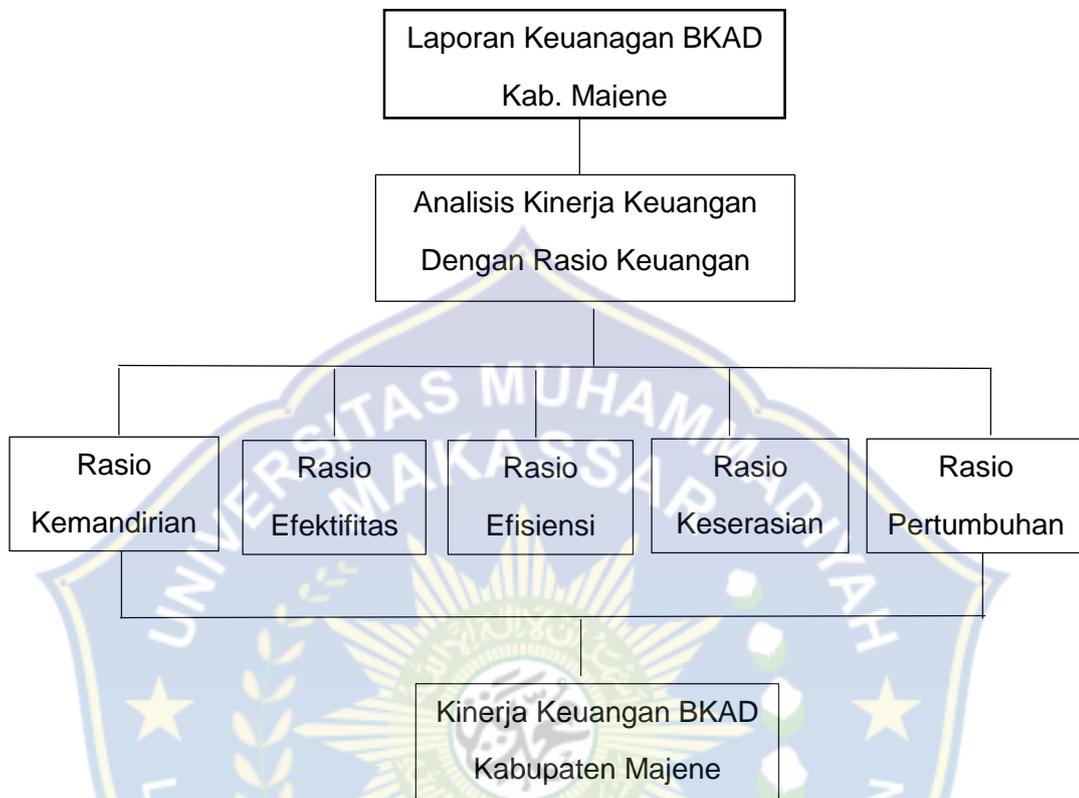
					keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan disetiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengelolaan keuangan daerah nantinya. Ini dikarenakan keuangan daerah menjadi mobilisator terhadap sumber-sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Dengan melihat analisis tersebut, dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan di Kabupaten Majene. Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Menurut Mohamad Mahsun (2012:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang *strategic planning* suatu organisasi. Dan Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Pada peneliti sebelumnya, Joko Pramono (2014) meneliti dengan Judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, dimana dalam penelitian itu mendapatkan hasil penelitian, yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83% (2010) dan 24,44% (2011).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menentukan hipotesis sebagai berikut : Analisis Rasio dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan dari berbagai sumber. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Majene jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian ini pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene yang berlokasi Jl. Gatot Subroto, Kecamatan Banggae. Waktu penelitian direncanakan dalam kurung waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	2019								
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
Pengajuan Judul									
Pembuatan proposal									
Seminar Proposal									
Perbaikan Proposal									
Pelaksanaan Penelitian									
Pengolahan Data, Analisis dan Penyusunan laporan									
Seminal Hasil									
Perbaikan laporan									

C. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

Menurut Sugiyono (2016:38) definisi variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (x) dan variabel dependen (y).

1. Variabel Independen/Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel independen/variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (bertingkat). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Keuangan (x). Pemerintah Daerah mencangkup beberapa rasio, yaitu sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Variabel Dependen/Variabel Terikat (y)

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel dependen/variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan (y).

Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oasi Agustina (2013:3) dalam jurnalnya, Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk Kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:185) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Laporan keuangan/Dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Majene periode 2016 dan 2017.

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:188) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan tehknik penarikan sampel secara penuh (*total*

sampling) dimana semua jumlah populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah semua Laporan Keuangan/Dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Majene periode 2016 dan 2017.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dijadikan landasan dalam proses analisis, maka teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis data sekunder. Adapun metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data laporan realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene.

F. Metode Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010:143). Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mohamad Mahsun (2012:187), adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
 - b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
 - c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.
2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
100% keatas Tidak Efisien	100% keatas Tidak Efisien
100% Efisiensi Berimbang	100% Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100% Efisien	Kurang dari 100% Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$Rasio\ Belanja\ Operasi = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. (Mahmudi 2010:164).

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Belanja\ Modal = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan

investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010:138). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber

daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007:L-5).

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil dan Sejarah Pendirian Badan Keuangan dan Aset Daerah

BKAD Kabupaten Majene

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Majene untuk Pengelolaan keuangan ditangani oleh bagian keuangan secretariat daerah dan untuk Barang Milik Daerah/Aset di tandatangani Bagian Umum secretariat daerah, sedangkan pendapatan dikelola Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Majene untuk peningkatan kinerja tahun 2014, dibentuklah Lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene di dasarkan pada peraturan Daerah No.13 tahun 2008 sesuai peraturan pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah .

Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene ditetapkan pada tanggal 18 November 2008 dipimpin oleh Kepala Dinas Drs.H RAMLI PULOO MM. Pada bulan Februari tahun 2013 Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah di lebur menjadi dua Dinas yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) ini bertujuan untuk memacu dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) dipimpin oleh Kepala Dinas H. MUH. FADLIN FK, S.Pd. MH dan Dinas

pendapatan daerah (Dispenda) Drs. H RAMLI PULOO MM. Pada tahun 2014 DPKAD dipimpin oleh Drs. RAMLI MH dan pada tahun 2015 mengalami perubahan pembentukan organisasi dan tata kerja berdasarkan peraturan daerah No.3 tahun 2015 dimana struktur organisasi DPKAD berubah seperti penambahan bidang perbendaharaan dan perubahan atas nama masing-masing nomenklatur jabatan.

Pada tahun 2016 Kepala DPKAD yang dijabat oleh Kadis(Kepala Dinas) bernama Ir. H. MUHAMMAD FAUZI melalui surat keputusan bupati Nomor:820/BK-DD/678/VI/2016 Pada tanggal 17 juni 2016, dan pada tanggal 1 April 2017 Kepala DPKAD atasnama Ir. H. MUHAMMAD FAUZI, memasuki masa pensiun dan diganti oleh PLT Drs. LAWAJI. MM melalui surat keputusan Bupati Majene No:821/BK-PSDM/231/III/2017 Pada tanggal 31 Maret 2017. Kemudian pada tahun 2017 inilah DPKAD berubah menjadi BKAD (Badan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Majene, selanjutnya Drs. Lawaji MM sebagai PLT BKAD dilantik sebagai pejabat defenitik kepala BKAD pada bulan februari 2018, dan pada tanggal 20 september 2018 terjadi pergantian kepala BKAD yang setelah Drs Lawaji MM digantikan oleh Kasman, SE,MM berdasarkan surat keputusan bupati 1480/HK/KEP-BUP/2018 tanggal 10 september 2018 dan sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala BKAD.

2. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Prima dalam Pelayanan

Misi : Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi, Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah, Meningkatkan Sarana, Prasarana dan SDM dalam Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

3. Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Majene

Tabel 4.1

Daftar nama-nama pegawai/staf BKAD Kabupaten Majene

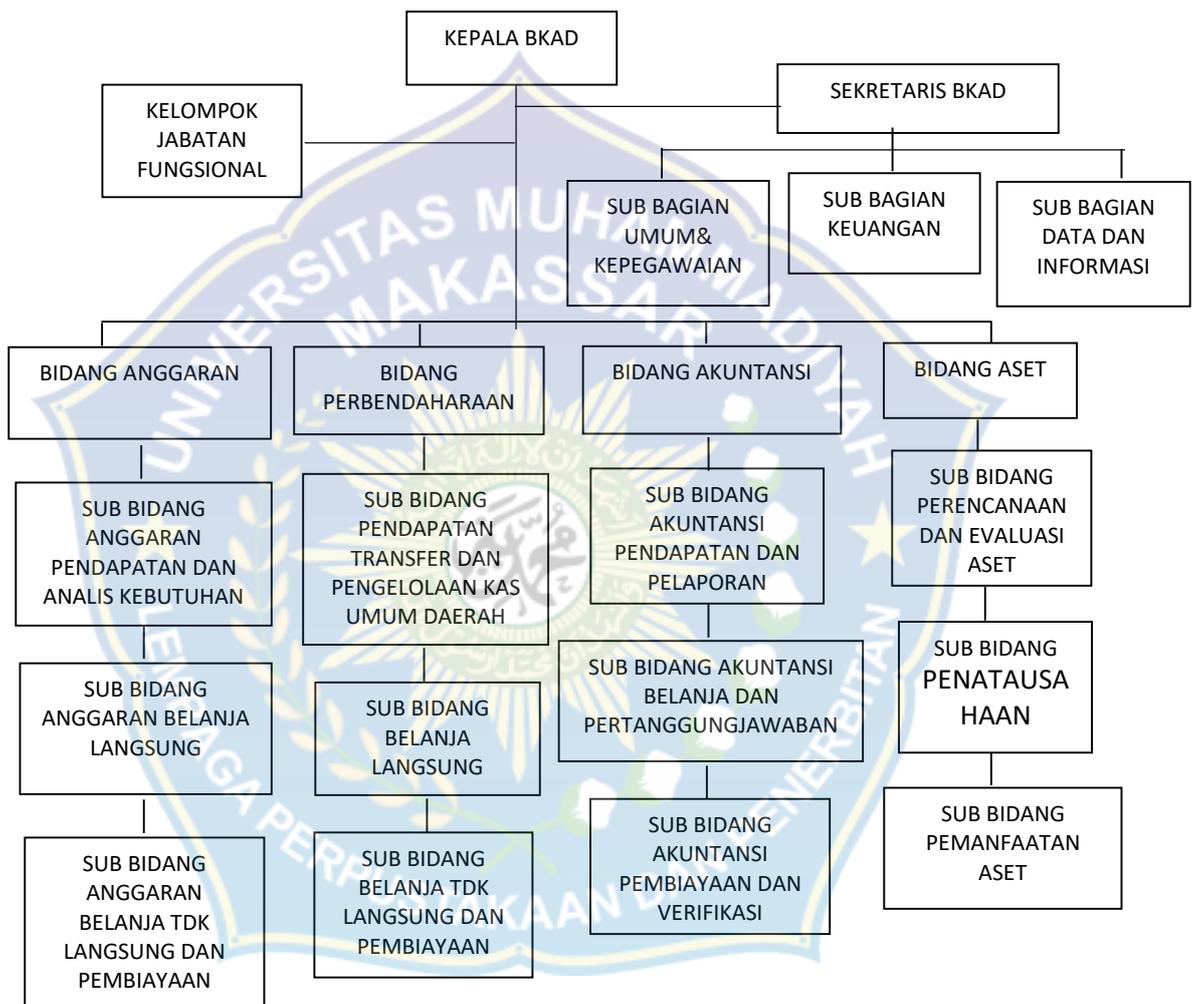
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Easlon II	1	-	1
2	Easlon III	3	1	4
3	EAslon IV	11	4	15
4	Non Easlon/Staf	24	14	38
Jumlah				58

Tabel diatas merupakan daftar nama-nama pegawai/staf BKAD Kabupaten Majene yang bekerja di bidang masing-masing yang dimana jumlah pegawai laki-laki easlon II berjumlah 1 orang, easlon III berjumlah 3 orang, easlon IV berjumlah 11 orang dan non easlon/staf berjumlah 24 orang. Begitu pula dengan pegawai perempuan terdapat easlon III dan IV berjumlah 1 dan 4 orang dan non easlon berjumlah 14

orang, jadi total jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD kabupaten sebanyak 58 orang

4. Struktur Organisasi

STRUKTUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

5 Job Description

Struktur organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawain
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
 - 3) Sub Bidang SIPKD.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji
 - 3) Sub Bidang Kas Daerah
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 2) Sub Sub Bidang Akuntansi dan Verifikasi;
 - 3) Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Bidang Aset, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 - 2) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
 - 3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian.
- a. Kepala Badan

Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina, dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi :

- 1) Menetapkan rumusan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat
- 2) Menetapkan rumusan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat
- 3) Membina bawahan dalam hal pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
- 4) Memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 5) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 6) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan Anggaran dan Belanja Daerah
- 7) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
- 8) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan pinjaman, jaminan, utang dan piutang daerah;
- 9) Pelaksanaan tugas sebagai pejabat pengelola keuangan daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah (BUD)

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan melakukan koordinasi dan/atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi, dan pengelolaan Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang perencanaan pembangunan daerah khususnya urusan dalam, meliputi :

- 1) Merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas ke bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan;
- 5) Mengadakan koordinasi kepada seluruh bidang sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- 6) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis setiap kegiatan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- 7) Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun dilingkup BPKAD;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), Penetapan Kinerja (TAPKIN) pada setiap bidang agar sesuai dengan pelaksanaan kinerja masing-masing bidang;
- 9) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi sehingga dapat menghasilkan data yang lebih akurat;
- 10) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian dan umum untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;

- 11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi program untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal;
- 12) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas sehingga pembinaan dan ketatalaksanaan dapat berjalan dengan lancar;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;
- 14) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan dibidang anggaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang anggaran, meliputi :

- 1) Pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah dan penyusunan APBD;
- 2) Pengkoordinasian bahan perumusan pedoman penyusunan APBD dan PAPBD;

- 3) Pelaksanaan rekapitulasi dokumen anggaran dan perubahan anggaran SKPD;
 - 4) Penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan menyusun analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
 - 5) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran PAPBD;
 - 6) Penyusunan alokasi dan perubahan anggaran daerah dan penyusunan analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal;
 - 7) Penyiapan anggaran kas daerah;
 - 8) Penyiapan dan penertiban SPD;
 - 9) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
 - 10) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi perbendaharaan, belanja pegawai dan non pegawai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan dibidang perbendaharaan, pelaksanaan kedinasan lain sesuai bidang tugasnya, meliputi :

- 1) Perencanaan operasional kegiatan perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Perumusan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris setiap akhir tahun anggaran; Pelaksanaan Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Bidang Perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 4) Penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan APBD;
- 5) Penyelenggaraan fungsi Kuasa BUD;
- 6) Pelaksanaan penelitian penginputan data perubahan gaji, menertibkan dan penatausahaan daftar gaji SKPD, melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 7) Pengkoordinasian system penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, pencocokan data (Rekonsiliasi) atas pengelolaan dan pemantauan suku bunga bank;

- 8) Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Perbendaharaan;
- 9) Pengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta member penilaian prestasi kerja;
- 10) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

B. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2016-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Majene yang didapat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.2

Rasio Kemandirian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Majene

Tahun Anggaran	PAD	Total Pendapatan	Rasio Ekonomis	Pola Hubungan
2017	83,238,112,411.80	918,545,076,665.88	9%	Instruktif
2016	50,615,846,995.75	800,529,893,025.62	6%	Instruktif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 di atas kemampuan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2016 Nilai ekonomi yaitu 6% dan pada tahun 2017 naik

menjadi 9%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Majene dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan

program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Rasio Efektivitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Majene

Tahun Anggaran	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektiv	Kriteria
2017	916,743,403,103.66	918,545,076,665.88	100%	Berimbang
2016	892,228,943,039.07	800,529,893,025.62	90%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene pada tahun 2016 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 90%, hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Majene pada tahun 2016 tidak efektif dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk tahun 2017 dapat dikatakan berimbang karena nilai yang diperoleh yaitu 100%, hal ini membuktikan

bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) berimbang dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

Rasio Efisiensi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Majene

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisien	Kriteria
2017	782,626,419,042.01	918,545,076,665.88	85%	Efisien
2016	714,741,245,288.00	800,529,893,025.62	89%	Efisien

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa Efisiensi Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene tahun 2016 dan 2017 tergolong efisien karena nilai rasionya di bawah 100% yaitu 89% dan 85%. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Majene bisa menekan jumlah Belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan Pendapatan dan Belanja daerahnya dengan baik, hal ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan daerah karena pendapatan yang dimiliki daerah lebih besar dibandingkan belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten majene. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten majene dalam meningkatkan pendapatan daerah.

4. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5

Rasio Keserasian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Majene (Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Total Belanja	Realisasi Belanja Modal	Rasio Belanja Modal
2017	198,434,513,429.01	782,626,419,042.01	25%
2016	149,384,498,183.00	714,741,245,288.00	21%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene sebesar 23%. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 21%, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 25%. Hal ini menandakan bahwa Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene untuk tahun 2016 dan 2017 masih dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Hasil dari perhitungan dari Rasio Pertumbuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene (Belanja Modal) Periode 2016-2017 yang diketahui pendapatan tahun 2015 sebesar Rp. 782,530,360,623.56 dapat di lihat di tabel di bawah ini :

Tabel 4.6

Rasio Pertumbuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Kabupaten Majene

Tahun Anggaran	Pendapatan Awal	Pendapatan Akhir	Pertumbuhan Pendapatan
2017	800,529,893,025.62	918,545,076,665.88	15%
2016	782,530,360,623.56	800,529,893,025.62	2%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang positif. Pendapatan pada tahun 2016 sebesar 2% dan meningkat sangat pesat di tahun 2017 yaitu sebesar 15%. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Majene semakin tinggi.

C. Pembahasan

Dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan tahun anggaran 2016 dan 2017 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene berada di kriteria sangat kurang. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sangat tergantung kepada sumber lain (pihak ekstern). Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Majene tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya. Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Dari hasil perhitungan Rasio Efektifitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene Pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 90% yang masuk dalam kategori Tidak Efektif, hal ini membuktikan pemerintah daerah Kabupaten Majene pada tahun 2016 tidak efektif dalam merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hal ini berbeda dengan tahun anggaran 2017 rasio efektifitas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene mengalami kenaikan sebesar 100% yang masuk dalam kategori Berimbang, hal ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu masih berada dikategori Tidak Efektif. Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Dari hasil perhitungan Rasio Efisiensi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene Pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 sebesar 89% dan 85% berdasarkan hasil tersebut, maka Rasio Efektifitas Tahun Anggaran 2016 dan 2017 berada di kriteria Efisien, hal ini membuktikan pemerintah daerah Kabupaten Majene pada tahun anggaran 2016 dan 2017 Sangat Efisien dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk tingkat rasio keserasian yang diukur dari rasio belanja modal untuk tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan. Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene untuk tahun 2016 dan 2017 masih dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Untuk tingkat rasio pertumbuhan pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene yang diukur untuk tahun 2016 dan 2017 tumbuh secara positif. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi daerah mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Majene semakin tinggi. Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah

dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan didapat disimpulkan bahwa Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah. Begitupun untuk rasio efektivitas yang juga masih dibawah standar keuangan daerah. Dan untuk rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Majene berada dalam kategori efisien. Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten majene untuk belanja modal cukup baik. Dan Untuk tingkat rasio pertumbuhan pendapatan yang diukur untuk tahun 2016 dan 2017 tumbuh secara positif. Sehingga dari hasil perhitungan rasio tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Daerah pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene.

B. Saran

1. Sebaiknya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada, seperti peningkatan pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. 2015. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Periode 2007-2011)*. Jurnal EBBANK. VI(1). 1-18.
- Bahrin Assidiqi. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fitriyah Agustin. 2007. "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hermi Oppier. 2013. "Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara". Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013.
- Jusmawati. 2011. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mohammad Mahsun. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Pramono, J. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makarti. VII(13). 83-112.
- Hafni, Nurlia. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013*. KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017
- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta

Mohammad Mahsun. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE : Yogyakarta

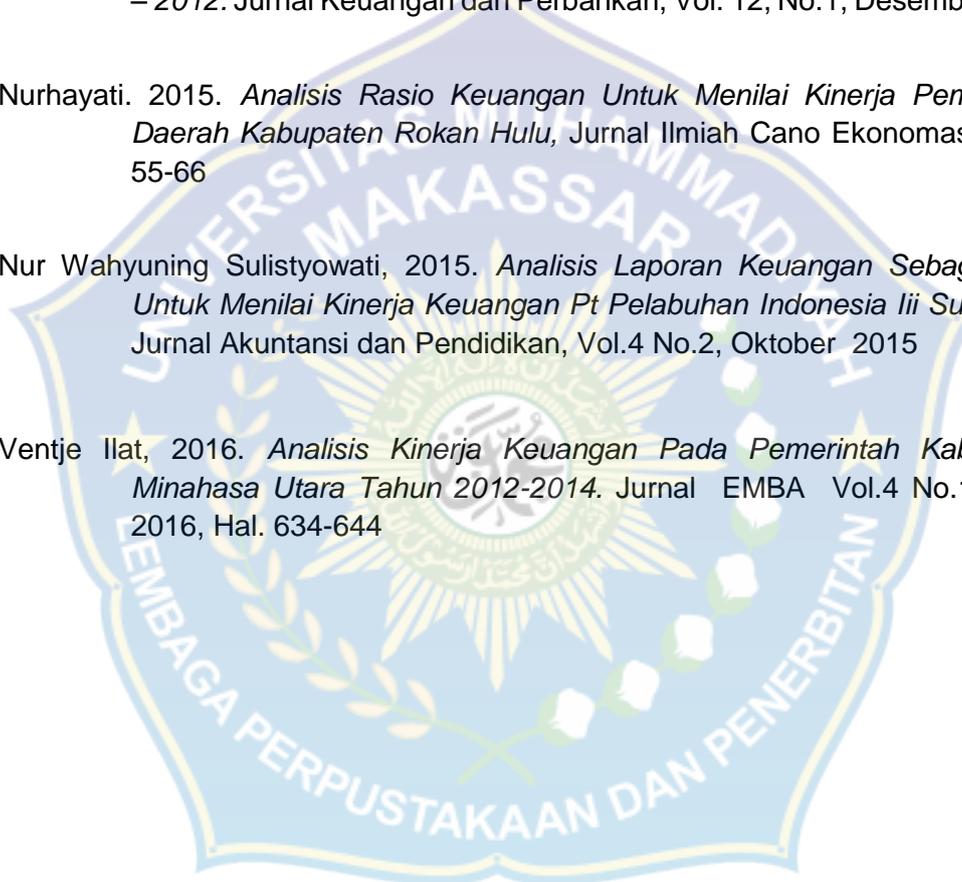
Listiyani Natalia, 2015. *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*, *Jurnalsosio-Humaniora* Vol. 6 No. 1 Mei 2015

Lambok DR Tampubolon, 2015. *Analisis Pengaruh Rasio Keuangan: Likuiditas, Aktivitas Dan Leverage Terhadap Penilaian Kinerja Keuangan Studi Empiris: Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2012*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No.1, Desember 2015

Nurhayati. 2015. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu*, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomas*. IV(1). 55-66

Nur Wahyuning Sulistyowati, 2015. *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt Pelabuhan Indonesia Iii Surabaya*. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol.4 No.2, Oktober 2015

Ventje Ilat, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014*. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 634-644



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 OKTOBER 2017

KABUPATEN MAJENE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	2016			%	2015
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	8.372.175.731,00	6.065.563.301,50	(2.306.612.429,50)	72,45	5.634.570.646,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	13.636.174.600,00	12.192.213.718,75	(1.443.960.881,25)	89,41	12.086.249.408,76
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.127.344.997,00	3.127.344.997,00	-	100,00	2.665.519.102,61
6	Lain-lain PAD yang sah	37.883.252.731,66	29.230.724.978,50	(8.652.527.753,16)	77,16	24.845.649.236,19
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	63.018.948.059,66	50.615.846.995,75	(12.403.101.063,91)	80,32	45.231.988.393,56
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER					
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	17.779.800.613,00	14.836.261.805,00	(2.943.538.808,00)	83,44	13.813.662.850,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.242.443.000,00	542.088.117,90	(700.354.883,00)	43,63	929.055.839,00
13	Dana Alokasi Umum	518.259.515.000,00	518.259.815.000,00	-	100,00	504.387.592.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	225.838.518.000,00	156.449.093.247,00	(69.389.424.753,00)	69,27	97.542.470.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	763.120.276.613,00	690.886.958.169,00	(73.033.318.444,00)	90,43	616.672.780.689,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
18	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian	704.787.000,00	704.787.000,00	-	100,00	81.774.870.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat L	704.787.000,00	704.787.000,00	-	100,00	81.774.870.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.983.779.366,41	14.786.393.069,87	(6.197.386.296,54)	70,47	14.886.083.541,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	20.983.779.366,41	14.786.393.069,87	(6.197.386.296,54)	70,47	14.886.083.541,00
26	Total Pendapatan Transfer	784.808.842.979,41	705.578.138.238,87	(79.230.704.740,54)	89,90	713.333.734.230,00
27						
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
29	Pendapatan Hibah	3.217.261.000,00	3.152.016.791,00	(65.244.209,00)	97,97	1.217.954.000,00
30	Bantuan keuangan khusus	1.276.000.000,00	1.276.000.000,00	-	-	4.965.000.000,00
31	Dana Desa	39.907.891.000,00	39.907.891.000,00	-	-	17.781.684.000,00
32	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	44.401.152.000,00	44.335.907.791,00	(65.244.209,00)	99,85	23.964.638.000,00
33	JUMLAH PENDAPATAN	892.228.943.039,07	800.829.893.025,62	(91.699.050.013,45)	89,72	782.530.360.623,56
34						
35	BELANJA					
36	BELANJA OPERASI					
37	Belanja Pegawai	423.538.788.838,69	425.690.128.475,00	2.151.339.636,31	100,51	404.048.285.281,70
38	Belanja Barang	168.669.901.027,47	133.223.158.970,00	(35.446.742.057,47)	78,98	116.703.994.792,66
40	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
41	Belanja Hibah	5.352.000.000,00	4.111.898.660,00	(1.240.101.340,00)	76,83	53.663.357.797,00
42	Belanja Bantuan Sosial	2.314.000.000,00	1.935.583.500,00	(378.416.500,00)	83,65	3.008.377.643,00
43	JUMLAH BELANJA OPERASI	599.874.689.866,16	564.960.769.605,00	(34.913.920.261,16)	94,18	577.424.015.514,36
44						
45	BELANJA MODAL					
46	Belanja Tanah	9.260.016.200,00	8.514.638.040,00	(745.358.160,00)	91,95	7.470.401.100,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	36.774.011.731,00	20.646.137.604,00	(16.127.874.127,00)	36,37	23.552.977.795,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	30.893.356.356,00	29.259.527.062,00	(1.633.829.294,00)	94,71	48.484.990.787,00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.030.309.774,00	90.833.508.477,00	(5.196.801.297,00)	94,59	87.959.791.813,00
50	Belanja Aset Lainnya	130.667.000,00	130.667.000,00	-	100,00	228.600.000,00
51	JUMLAH BELANJA MODAL	193.088.361.061,00	149.384.498.183,00	(43.703.862.878,00)	77,37	167.696.761.495,00
52						
53	BELANJA TAK TERDUGA					
54	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	395.977.500,00	(104.022.500,00)	79,20	1.159.064.228,00
55	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000,00	395.977.500,00	(104.022.500,00)	79,20	1.159.064.228,00
56						
57	JUMLAH BELANJA	793.463.050.927,16	714.741.245.288,00	(78.721.805.639,16)	90,08	746.279.841.237,36
58						

NO	URAIAN	2016			%	2015
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)		
59	TRANSFER					
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
61	Bagi Hasil Pajak	813.000.000,00	388.329.702,23	(424.670.297,77)	47,77	485.596.641,00
62	Bagi Hasil Retribusi	440.399.500,00	164.502.755,82	(275.896.744,18)	37,35	320.066.703,00
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	99.497.967.939,57	85.366.636.080,51	(14.131.331.859,06)	85,80	35.623.068.329,60
64	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Desa	100.751.367.439,57	85.919.468.538,56	(14.831.898.901,01)	85,28	36.428.731.673,60
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	894.214.418.366,73	800.660.713.826,56	(93.553.704.540,17)	89,54	782.708.572.910,96
66						
67	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.985.475.327,66)	(130.820.800,94)	1.854.654.526,72	6,59	(178.212.287,40)
68						
69	PEMBIAYAAN					
70	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
71	Penggunaan SILPA	3.742.790.116,66	3.706.036.301,66	(36.753.815,00)	99,02	5.055.822.089,35
72	Penerimaan Kembali Piutang	200.000.000,00	31.008.800,60	(168.991.199,40)	15,50	65.180.314,71
73						
74	Jumlah Penerimaan	3.942.790.116,66	3.737.045.102,26	(205.745.014,40)	94,78	5.121.002.404,06
75						
76	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
77	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.631.261.000,00	1.631.260.791,00	(209,00)	100,00	1.200.000.000,00
78	Pembayaran utang jangka panjang lainnya	326.053.789,00	-	(326.053.789,00)	-	-
79						
80	Jumlah Pengeluaran	1.957.314.789,00	1.631.260.791,00	(326.053.998,00)	83,34	1.200.000.000,00
81						
82						
83	PEMBIAYAAN NETO	1.985.475.327,66	2.105.784.311,26	120.308.983,60	106,06	3.921.002.404,06
84						
85	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	1.974.963.510,32	1.974.963.510,32	-	3.742.790.116,66

MAJENE, 11 OKTOBER 2017

BUPATI MAJENE

DR. H. FAHMI MASSIARA, MH





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO. URUT	URAIAN	2017		%	2016
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
4	PENDAPATAN - LRA				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	88.662.543,617.25	83.238.112,411.80	93.88	50.615.846,995.75
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	6.204,074,219.00	6.763,363,698.00	109.01	6.065,563,301.50
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	15,386,796,590.00	13,489,680,956.38	87.78	12,192,213,718.75
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3,345,799,260.97	3,345,799,260.97	100.00	3,127,344,997.00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah - LRA	63,745,873,547.28	59,639,268,496.45	93.56	29,230,724,978.50
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	741,508,187,478.00	732,543,941,046.00	98.79	690,086,958,169.00
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAMA, PEMBANGUNAN - LRA	14,674,810,225.00	12,019,838,643.00	81.91	14,836,261,805.00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	1,504,343,253.00	532,162,713.00	35.38	542,088,117.00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA	509,399,903,000.00	509,399,905,000.00	100.00	518,259,515,000.00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LRA	215,929,129,000.00	210,592,034,690.00	97.53	156,449,093,247.00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - LRA	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	-
4.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	-
4.2.2.1	Dana Otonomi Khusus - LRA	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	100.00	-
4.2.2.2	Dana Penyesuaian - LRA	-	-	-	-
4.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA	23,620,432,008.41	22,556,600,906.08	95.50	14,786,393,069.87
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	18,220,432,008.41	17,156,600,906.08	94.16	14,786,393,069.87
4.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00	100.00	-
4.2.4	BANTUAN KEUANGAN - LRA	-	-	-	1,276,000,000.00
4.2.4.1	Bantuan keuangan khusus - LRA	-	-	-	1,276,000,000.00
	Total Pendapatan Transfer - LRA	772,628,619,486.41	762,600,541,952.08	98.70	704,873,351,238.87
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	55,452,240,000.00	72,706,422,302.00	131.12	43,764,694,791.00

4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5,021,180,000.00	22,189,538,902.00	441.92	3,152,016,791.00
4.3.2	Pendapatan Lain Lainnya - LRA Dana Desa	50,431,060,000.00	85,823,400.00	100.00	704,787,000.00
			50,431,060,000.00		39,907,891,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	916,743,403,103.66	918,545,076,665.88	100.20	799,253,893,025.62
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	605,353,784,869.52	584,103,376,813.00	96.49	564,960,769,605.00
5.1.1	Belanja Pegawai	373,661,556,739.52	370,121,493,233.00	99.05	425,630,128,475.00
5.1.2	Belanja Barang	224,345,628,130.00	206,657,683,580.00	92.12	133,223,158,970.00
5.1.5	Belanja Hibah	891,600,000.00	891,600,000.00	100.00	4,111,898,660.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6,455,000,000.00	6,432,600,000.00	99.65	1,985,583,500.00
5.2	BELANJA MODAL	204,670,803,869.43	198,434,513,429.00	96.95	149,384,498,183.00
5.2.1	Belanja Tanah	11,291,410,897.00	10,899,315,400.00	92.10	8,514,658,040.00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	45,016,861,089.43	42,909,434,797.00	95.32	20,646,137,604.00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	43,339,148,683.00	41,997,928,381.00	96.88	29,259,527,062.00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	102,789,762,200.00	100,909,019,881.00	98.20	90,833,508,477.00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,253,621,000.00	2,218,815,000.00	98.46	130,667,000.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	200,000,000.00	88,528,800.00	44.26	395,977,500.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	200,000,000.00	88,528,800.00	44.26	395,977,500.00
	JUMLAH BELANJA	810,224,588,738.95	782,626,419,042.00	96.59	714,741,245,288.00
					85,919,468,538.56
6	TRANSFER	106,452,777,875.03	105,509,793,261.60	99.11	85,919,468,538.56
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	1,289,715,864.30	931,652,671.00	72.24	85,919,468,538.56
6.1.1	Bagi Hasil Pajak	826,339,421.90	636,373,400.00	77.01	388,329,702.23
6.1.2	Bagi Hasil Retribusi				164,502,755.82
6.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	463,376,442.40	295,279,271.00	63.72	85,366,636,080.51
6.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	105,170,062,010.73	104,578,140,590.60	99.44	
6.2.2	Bantuan Keuangan Desa	104,486,655,420.10	103,894,734,000.00	99.43	
6.2.3	Bantuan Keuangan Lainnya	683,406,590.63	683,406,590.60	100.00	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	916,684,366,613.98	888,136,212,303.60	96.89	800,660,713,826.56

	SURPLUS/ (DEFISIT)	59.036.489,68	30.408.864.362,28	51.509	11.406.820.800,941
7	PEMBIAHYAAN				
7.1	Penggunaan SILPA	1.974.963,510,32	1.974.963,510,32	100,00	3.706.036.301,66
7.1.1	Penerimaan Kembali Putang	40.000,00	40.000,00	0,60	31.008.800,60
7.1.4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	260.000,00	260.000,00	0,60	
7.2	Jumlah Penerimaan	2.174.963,510,32	1.976.163,510,32	90,86	3.737.045,102,26
7.2.2	Penerimaan Modal (Investasi Kementah Daerah	1.234.000,00	1.234.000,00	100,00	1.631.260,791,00
7.2.8	Penyayaran utang jangka panjang lainnya	1.000.000,00	742.163,510,32	1.257,131	2.105.784.311,26
	Jumlah Pengeluaran	2.234.000,00	1.234.000,00	55,24	1.631.260,791,00
	PEMBIAHYAAN NETO	69.036,489,68	742.163,510,32	1.257,131	2.105.784.311,26
		0,00	31.151.027,872,60		698.963,510,32



Majene, 31 Agustus 2018
 BRIZATI MAJENE
 DR. H. FAHMI MASSIARA, MH

Lampiran 3
Hasil Perhitungan Rasio

RASIO EFEKTIVITAS

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	EFEKTIVITAS
2017	916,743,403,103.66	918,545,076,665.88	100%
2016	892,228,943,039.07	800,529,893,025.62	90%

RASIO EFISIENSI

TAHUN	BELANJA DAERAH	PENDAPATAN DAERAH	EFISIENSI
2017	782,626,419,042.01	918,545,076,665.88	85%
2016	714,741,245,288.00	800,529,893,025.62	89%

RASIO KESERASIAN

TAHUN	TOTAL BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO BELANJA MODAL
2017	198,434,513,429.01	782,626,419,042.01	25%
2016	149,384,498,183.00	714,741,245,288.00	21%

RASIO PERTUMBUHAN

Tahun Anggaran	Pendapatan Awal	Pendapatan Akhir	Pertumbuhan Pendapatan
2017	800,529,893,025.62	918,545,076,665.88	15%
2016	782,530,360,623.56	800,529,893,025.62	2%

RASIO KEMANDIRIAN

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN	RASIO EKONOMIS
2017	83,238,112,411.80	918,545,076,665.88	9%
2016	50,615,846,995.75	800,529,893,025.62	6%